

DANA PERIMBANGAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA: SEBUAH BUKTI PENGUJIAN DARI PULAU KALIMANTAN

Oleh:

Evi Maria¹

Abdul Halim²

Muhammad Luthfan³

Fakultas Teknologi Informasi¹, Fakultas Ekonomika dan Bisnis^{2,3}
Universitas Kristen Satya Wacana¹, Universitas Gadjah Mada^{2,3}

Email:

Evi.maria@uksw.edu

ABSTRAK

Tujuan riset ini adalah untuk menginvestigasi hubungan antara dana perimbangan dan pembangunan manusia dan melihat perilaku penggunaan anggaran di Pulau Kalimantan Riset ini menggunakan analisis regresi data panel menggunakan sampel empat provinsi di Pulau Kalimantan dengan tahun amatan 2010-2016. Hasil riset menemukan secara parsial Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh positif pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Sedangkan, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Ini karena Dana Bagi Hasil Pulau Kalimantan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2014-2016 dan penggunaan Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam dibatasi oleh regulasi tentang kelestarian lingkungan hidup. Secara simultan, dana perimbangan, yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Riset ini menemukan bahwa implementasi desentralisasi di Indonesia membuat pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai program pembangunan manusia di daerah.

Kata Kunci: dana perimbangan, pembangunan manusia, desentralisasi, pemerintah daerah.

ABSTRACT

The purpose of this research is to investigate the relationship between fiscal balance funds and human development and also to see the behavior of budget use in the Kalimantan Island. This research uses panel data regression analysis using a sample of four provinces in Kalimantan Island with the observation year 2010-2016. The results of the study found partially the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund had a positive influence on human development on the Kalimantan Island. Meanwhile, the Revenue Sharing Fund has no effect on human development on the Kalimantan Island. This is because the Kalimantan Island Revenue Sharing Fund experienced a significant decline in 2014-2016 and the use of the Revenue Sharing Fund from Natural Resources is limited by regulation on environmental sustainability. Simultaneously, fiscal balancing funds, namely General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Revenue Sharing Funds has an influence on human development on the Kalimantan Island. This research found that the implementation of decentralization in Indonesia made local governments tend to rely on Fiscal Balance Funds to finance human development programs in the regions.

Keywords: *fiscal balance funds, human development, decentralization, local governments*

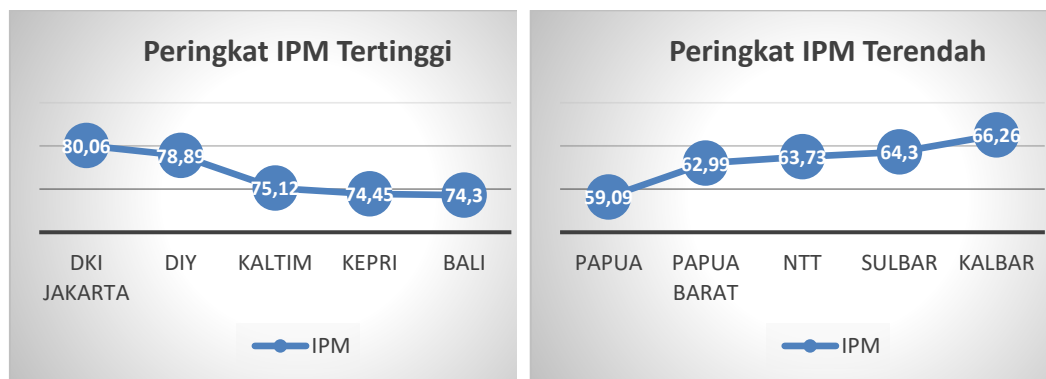
A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, orientasi pembangunan mengalami perubahan. Awalnya, pembangunan negara/daerah hanya difokuskan pada program peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi sekarang fokus pembangunan bergeser ke arah peningkatan kualitas manusia atau disebut dengan pembangunan manusia. Pergeseran ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi disuatu negara, tidak menjamin masalah sosial, seperti gelandangan, pengangguran, penyalahgunaan obat terlarang, AIDS, dan lain-lain dapat berkurang (UNDP 1990). Pembangunan manusia menjadi fokus perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. Kemajuan negara dinilai dari pembangunan manusianya (Widodo *et al.*, 2011; Pramono dan Soesilowati 2016). Manusia dipandang tidak hanya sebagai subyek, yaitu pelaku pembangunan, tetapi sekarang ini manusia juga dipandang sebagai obyek pembangunan, yaitu sasaran pembangunan (UNDP 1990; Kuncoro 2011). Penciptaan lingkungan kondusif agar manusia dapat hidup lebih lama, kreatif dan sehat adalah tujuan akhir pembangunan manusia (Sukirno 2015).

Perubahan fokus pembangunan dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia berdampak pada perubahan pengukuran kinerja pembangunan. UNDP (1990) mengembangkan *Human Development Index* (HDI) sebagai indeks untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, dengan cara mengukur kesehatan, usia, pendidikan, keterampilan serta pendapatan penduduk di daerah untuk dapat hidup lebih layak. Di Indonesia, HDI sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menetapkan IPM

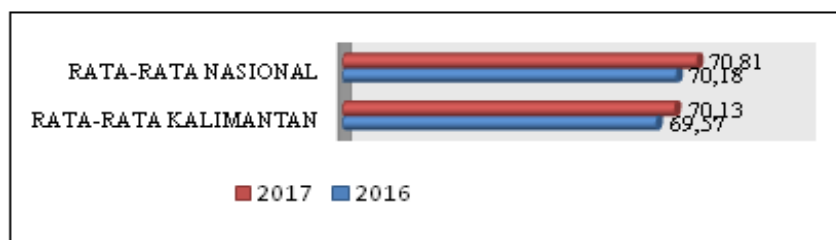
sebagai indeks untuk mengukur kinerja pembangunan manusia di kabupaten/kota, Indonesia. Ada empat tingkatan IPM berdasarkan skornya, yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah. Tujuannya, untuk mengorganisasikan kinerja pembangunan manusia daerah-daerah di Indonesia menjadi kategori yang sama. IPM sangat tinggi berarti daerah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang sangat berkualitas. Sayangnya, di Indonesia kesenjangan pembangunan manusia antar daerah masih relatif tinggi (Fauzia, 2019). Ini berarti perlu perhatian khusus terkait pembangunan manusia di Indonesia.

Hasil pengamatan IPM tahun 2017 pada 34 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa peringkat lima besar berdasarkan angka IPM tertinggi, yaitu DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Timur (Kaltim), Kepulauan Riau (Kepri), dan Bali. Sedangkan urutan IPM terkecil dimiliki oleh Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Kalimantan Barat (Kalbar). Peringkat IPM di Indonesia disajikan pada Gambar 1. Dari pengamatan ini, ditemukan hal yang menarik di Pulau Kalimantan. IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Barat berada di peringkat tiga dan peringkat 30 dari 34 provinsi di Indonesia. Ini berarti terjadi ketimpangan yang mencolok pada pembangunan manusia antar provinsi di Pulau Kalimantan.



Gambar 1. Peringkat IPM di Indonesia
Sumber: (BPS, 2018)

Jika ditinjau dari rata-rata IPM tahun 2017 di Pulau Kalimantan, ditemukan fakta bahwa pembangunan manusia di Pulau Kalimantan (70,13) berada dalam klasifikasi tinggi dan jika dibandingkan dengan IPM nasional, angka IPM-nya pun hampir mendekati IPM nasional (70,81). Perbandingan IPM nasional dan IPM Pulau Kalimantan tahun 2016 dan 2017 disajikan pada Gambar 2. Kondisi kesenjangan ini menunjukkan bahwa riset untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia di Pulau Kalimantan masih perlu untuk dilakukan.



Gambar 2 Perbandingan IPM Pulau Kalimantan dan Nasional
Sumber: (BPS, 2018)

Penerapan desentralisasi di Indonesia dilakukan dengan tujuan agar terjadi pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Desentralisasi diyakini sebagai strategi efektif dalam pengelolaan negara, dengan memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri (Baskaran 2012; Maria *et al.*, 2019). Desentralisasi memberi kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola aktivitas pendapatan, belanja, dan pembiayaannya sendiri. Pemerintah pusat hanya bertugas menyediakan prinsip-prinsip dalam kegiatan pengelolaan keuangan di daerah tanpa ada ketentuan rinci tentang manajemennya (Ritonga, 2014). Daerah diberi kebebasan untuk membuat program-program berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas dasar manusia, dalam rangka mensukseskan pembangunan manusia. Upaya peningkatan kapasitas dasar manusia dilakukan dengan cara memperbaiki kesehatan dan pengetahuan penduduk (UNDP 1990; Dao 2012; Craigwell *et al.*, 2012). Oleh sebab itu, kegiatan pembangunan manusia di daerah membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit (Sarkoro dan Zulfikar 2016). Program pembangunan tersebut, didanai dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktanya, di Indonesia terjadi kesenjangan PAD antara daerah, sehingga mendorong pemerintah pusat untuk mengalokasikan dana perimbangan kepada daerah. Dana perimbangan, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuannya, untuk membiayai kegiatan pelayanan publik dalam upaya mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup warga didaerahnya. Namun, apakah dana perimbangan memiliki hubungan dengan pembangunan manusia di Pulau Kalimantan, masih merupakan pertanyaan penelitian.

Selama ini riset-riset tentang dana perimbangan dan pengaruhnya pada pembangunan manusia telah dilakukan pada berbagai daerah di Indonesia, tetapi hasilnya masih inkonsisten. Riset Lestari *et al.*, (2016) dan Zaufi *et al.*, (2016) menemukan besarnya DAU berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia, namun riset Harahap (2011), Widarwanto *et al.*, (2014), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014), Williantara dan Budiasih (2016), Sarkoro dan Zulfikar (2016) menemukan hal sebaliknya, yaitu DAU tidak memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia. Tidak hanya DAU, ketidakkonsistenan hasil riset juga terjadi pada hubungan antara DAK dan pembangunan manusia. Widarwanto *et al.*, (2014), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014) menemukan pembangunan manusia di daerah ditentukan oleh besarnya DAK, tetapi riset Harahap (2011), Siswandi *et al.*, (2015), Lestari *et al.*, (2016), Williantara dan Budiasih (2016), Sarkoro dan Zulfikar (2016) menemukan hal sebaliknya, yaitu besarnya DAK tidak berpengaruh

pada pembangunan manusia. Sedangkan untuk DBH, Harahap (2011), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014), dan Lestari *et al.*, (2016) menemukan DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Inkonsistensi temuan riset terdahulu ini, membuat riset untuk melihat pengaruh dana perimbangan pada pembangunan manusia masih perlu untuk dilakukan. Kondisi tersebut, mendorong riset ini untuk dilakukan. Jadi, tujuan riset ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris terkait hubungan dana perimbangan dan pembangunan manusia dan melihat perilaku penggunaan anggaran di Pulau Kalimantan sebagai akibat dari penerapan desentralisasi.

Ada dua kontribusi dalam riset ini. *Pertama*, temuan riset berkontribusi untuk pengembangan ilmu Akuntansi Publik karena menyediakan bukti pengujian tentang hubungan dana perimbangan dan pembangunan manusia. *Kedua*, temuan riset berkontribusi bagi pemerintah. Temuan riset memberi informasi tentang dampak pemberian dana perimbangan terhadap kegiatan pembangunan manusia di daerah. Temuan riset juga memberikan informasi terkait perilaku penggunaan anggaran, yaitu dana perimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM di Pulau Kalimantan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kegiatan pengalokasian dana perimbangan dapat digambarkan dari sudut pandang teori keagenan (Sarkoro dan Zulfikar 2016). Dalam hubungan keagenan, pemerintah pusat diproksikan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah daerah diproksikan sebagai agen. Menurut teori keagenan, pendelegasian wewenang terjadi ketika prinsipal memilih orang/kelompok lain yang disebut dengan istilah agen untuk melakukan tindakan sesuai keinginan prinsipal (Jensen dan Meckling 1976). Pemerintah pusat memberikan wewenang atau hak pada daerah untuk mengatur dan mengelola aktivitas pendapatan, belanja, dan pembiayaannya sendiri. Dampak dari kebijakan tersebut, pemerintah pusat dituntut untuk mengalokasikan dana perimbangan dalam rangka membantu pendanaan aktivitas-aktivitas pelayanan publik di daerah tersebut.

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Belanja Pendapatan Negara (APBN) untuk dialokasikan pusat ke daerah dalam rangka membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah instrumen fiskal dari dana perimbangan. Tujuannya, untuk mengurangi kesenjangan fiskal sebagai dampak dari pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grants*. Artinya, pemerintah daerah berhak mengatur sepenuhnya penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerahnya. DAU digunakan daerah untuk membiayai belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, sehingga dana ini dialokasikan sesuai dengan prinsip keadilan dan pemerataan.

Riset terdahulu tentang DAU dan pembangunan manusia di Indonesia masih tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan apakah DAU dapat membawa dampak pada peningkatan pembangunan manusia atau malah sebaliknya, pembangunan manusia tidak dipengaruhi oleh DAU. Riset Harahap (2011), Widarwanto *et al.*, (2014), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014), Williantara dan Budiasih (2016), Sarkoro dan Zulfikar (2016) menemukan bahwa pembangunan manusia tidak

dipengaruhi oleh DAU, karena komponen utama alokasi dasar DAU di daerah adalah kegiatan belanja pegawai dan bukan untuk kepentingan penyediaan layanan publik (Harahap 2011; Williantara dan Budiasih 2016). Setelah desentralisasi fiskal diterapkan di Indonesia, serapan anggaran di daerah, cenderung digunakan untuk membiayai kegiatan belanja pegawai daripada kegiatan layanan publik (Chang dan Geoffrey 2002; Sjahrir *et al.* 2013; Maria *et al.* 2019). Namun, pendapat berbeda muncul dari kelompok riset lainnya. Riset Lestari *et al.*, (2016) dan Zaufi *et al.*, (2016) justru menemukan hal sebaliknya. DAU berpengaruh positif terhadap pembangunan manusia. DAU terbukti dapat membantu daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. DAU membuat kualitas pendidikan meningkat, standar hidup masyarakat meningkat, serta masyarakat dapat hidup dengan sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang. Dalam rangka menguji hubungan DAU dan pembangunan manusia, maka hipotesis pertama riset ini, yaitu:

H₁ : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Pulau Kalimantan

Selain DAU, komponen dana perimbangan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana dari APBN untuk mendanai kegiatan khusus di daerah tertentu, seperti kegiatan mengadakan dan memelihara sarana serta prasarana pelayanan dasar yang masuk dalam program prioritas nasional. Dana tersebut juga digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak bisa dihitung taksirannya menggunakan rumus alokasi umum. DAK bersifat *specific grants* karena dana ini dialokasikan ke daerah dengan syarat-syarat khusus berkaitan dengan penggunaannya. Selain itu, alokasi DAK ke daerah harus memperhatikan faktor kecukupan dana dalam APBN, seperti yang diamanatkan oleh UU No. 23/2014.

Hasil riset terdahulu yang meneliti hubungan antara DAK dan pembangunan manusia masih inkonsisten dalam menjawab pertanyaan apakah DAK dapat meningkatkan pembangunan manusia atau malah sebaliknya, pembangunan manusia tidak dipengaruhi oleh DAK. Riset Harahap (2011), Siswandi *et al.*, (2015), Lestari *et al.*, (2016), Williantara dan Budiasih (2016), Sarkoro dan Zulfikar (2016) menemukan pembangunan manusia tidak dipengaruhi oleh DAK. Ini terjadi karena penggunaan DAK hanya diperuntukkan untuk peningkatan sarana dan prasaran (fisik) sedangkan pembangunan manusia tidak diukur dari segi kuantitas terkait sarana dan prasarana fisik, tetapi pembangunan manusia diukur dari segi kualitas hidup manusia (Sarkoro dan Zulfikar 2016). Lestari *et al.*, (2016), Sarkoro dan Zulfikar (2016) menjelaskan bahwa proporsi DAK yang diterima daerah jauh lebih rendah dari DAU dan PAD yang dimiliki daerah sehingga membuat DAK tidak berpengaruh pada pembangunan manusia. Siswandi *et al.*, (2015) menemukan bahwa alokasi DAK belum sepenuhnya menitikberatkan pada kegiatan belanja yang menunjang peningkatan kualitas masyarakat di bidang pendidikan serta kesehatan karena program serta kegiatan prioritas nasional belum sinkron dengan indikator untuk mengukur pembangunan manusia.

Kelompok riset lain menemukan hal yang berbeda, yaitu DAK memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia (Widarwanto *et al.*, 2014; Ardiansyah

dan Widyaningsih 2014). Ini berarti DAK dapat meningkatkan pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka IPM. Daerah menggunakan DAK untuk kegiatan belanja modal, yaitu pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana kebutuhan dasar manusia, yaitu pendidikan dan kesehatan sehingga mempengaruhi kualitas masyarakat. DAK dalam bentuk kegiatan belanja modal untuk bidang kesehatan dan pendidikan ditemukan memiliki dampak positif terhadap kualitas hidup dan kualitas pendidikan warganya (Pramono dan Soesilowati 2016; Pake *et al.*, 2018). Dalam rangka menguji hubungan DAK dan pembangunan manusia, maka hipotesis kedua riset ini, yaitu:

H₂ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Pulau Kalimantan

Selain DAU dan DAK, Dana Bagi Hasil (DBH) juga komponen dana perimbangan yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan dari sumber daya alam. Besarnya DBH ditentukan berdasarkan potensi daerah yang menghasilkan sumber daya alam dengan persentase tertentu. DBH diberikan dalam rangka mengurangi kesenjangan kemampuan keuangan pusat dan daerah. DBH bersifat *block grants*. Oleh sebab itu, daerah dapat menentukan sendiri penggunaan DBH dan pemerintah pusat tidak boleh mengintervensinya.

Riset tentang hubungan DBH dan pembangunan manusia sudah dilakukan oleh Harahap (2011), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014), dan Lestari *et al.*, (2016). Hasil riset menemukan bahwa DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Kondisi ini disebabkan karena *pertama*, daerah hanya memiliki porsi DBH dalam jumlah kecil (Lestari *et al.*, 2016), *kedua*, regulasi yang dikeluarkan oleh negara membatasi keleluasan daerah untuk menggunakan DBH dalam rangka penyediaan layanan publik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Misalnya saja, DBH Kehutanan yang diperoleh dari dana reboisasi hanya boleh dipakai untuk pendanaan kegiatan reboisasi saja, tidak untuk kegiatan lainnya. Dalam rangka menguji hubungan DBH dan pembangunan manusia, maka hipotesis ketiga riset ini, yaitu:

H₃ : Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap pembangunan manusia di Pulau Kalimantan

C. METODE PENELITIAN

Sampel dan Data Penelitian

Pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan adalah populasi riset ini. Sampel riset dipilih menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria, yaitu provinsi memiliki data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dana perimbangan yang lengkap dan konsisten untuk tahun anggaran 2010-2016. Berdasarkan kriteria tersebut ada empat provinsi di pulau Kalimantan yang digunakan dalam riset ini, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan, Kalimantan Utara tidak lolos kriteria pemilihan sampel riset karena provinsi ini baru ditetapkan sebagai provinsi baru hasil pemekaran. Data IPM dan jumlah penduduk diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sedangkan

data DAU, DAK, dan DBH diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas empat provinsi yang menjadi sampel riset ini.

Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen riset ini, yaitu pembangunan manusia. Sedangkan variabel independennya, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), data Dana Alokasi Khusus (DAK), dan data Dana Bagi Hasil (DBH). Ringkasan definisi operasional dan pengukuran variabel riset disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Pengukuran Variabel Riset

Variabel	Kode	Pengukuran	Referensi
Pembangunan Manusia	PM	Indeks komposit gabungan dari angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta pengeluaran per kapita.	BPS 2010-2016
Dana Alokasi Umum	DAU	Realisasi DAU per kapita	LHP BPK dan BPS
Dana Alokasi Khusus	DAK	Realisasi DAK per kapita	
Dana Bagi Hasil	DBK	Realisasi DBH per kapita	

Sumber: data diolah

Pembangunan Manusia

Riset ini menggunakan definisi pembangunan manusia yang dikembangkan oleh UNDP (1990), yaitu usaha yang dilakukan untuk memperluas pilihan manusia. Pembangunan manusia dalam riset ini diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu skor komposit gabungan dari indikator kesehatan berupa angka harapan hidup, indikator pendidikan, berupa rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, serta indikator ekonomi, berupa pengeluaran per kapita. IPM menggambarkan pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Data IPM riset ini adalah data IPM dari empat provinsi yang ada di Pulau Kalimantan tahun 2010-2016.

Dana Alokasi Umum

Riset ini menggunakan definisi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diamanatkan UU No. 23/2014, yaitu dana dari pendapatan APBN. DAU digunakan untuk mendanai belanja daerah dalam rangka penerapan desentralisasi agar pemerataan kemampuan keuangan antar daerah terjadi. DAU diukur menggunakan realisasi DAU per kapita. Rasio DAU per kapita merupakan perbandingan DAU yang diperoleh daerah dari pusat terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mencerminkan total pendapatan dari APBN yang digunakan daerah untuk mendanai kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas daerah. Riset ini menggunakan data realisasi DAU tahun anggaran 2010-2016 dan jumlah penduduk tahun 2010-2016.

Dana Alokasi Khusus

Riset ini menggunakan definisi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diamanatkan UU No. 23/2014, yaitu dana dari pendapatan APBN untuk daerah tertentu. DAK digunakan untuk mendanai kegiatan khusus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. DAK diukur menggunakan realisasi DAK per kapita. Rasio DAK per kapita merupakan perbandingan DAK yang di dapat daerah dari pusat terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mencerminkan total pendapatan dari APBN yang digunakan daerah untuk mendanai kebutuhan khusus masyarakat untuk kegiatan penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana di daerah. Riset ini menggunakan data realisasi DAK tahun anggaran 2010-2016 dan jumlah penduduk tahun 2010-2016.

Dana Bagi Hasil

Riset ini menggunakan definisi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diamanatkan UU No. 23/2014, yaitu dana dari pendapatan tertentu APBN untuk daerah penghasil sumber daya alam berdasarkan tingkat persentase tertentu. DBH diberikan ke daerah dalam usaha mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. DBH diukur menggunakan realisasi DBH per kapita. Rasio DBH per kapita merupakan perbandingan DBH yang diperoleh daerah dari pusat terhadap jumlah penduduk. Rasio ini mencerminkan total pendapatan dari APBN yang digunakan daerah untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah. Riset ini menggunakan data realisasi DBH tahun anggaran 2010-2016 dan jumlah penduduk tahun 2010-2016.

Metode Analisis

Alat analisis riset ini, meliputi: *pertama*, pemilihan model analisis data panel terbaik (Gujarati, 2012) dengan melakukan tiga pengujian, yaitu (a) uji Chow, untuk memilih model terbaik antara *fixed effect* dan *common effect* dengan cara membandingkan nilai $F_{\text{statistik}}$ dan F_{tabel} . Jika nilai $F_{\text{statistik}} > F_{\text{tabel}}$ atau jika $\alpha < 5\%$, maka H_0 tidak terdukung. Artinya, model terpilih, yaitu model *fixed effect*, demikian sebaliknya. Jika model terpilih, yaitu model *common effect*, maka tidak perlu dilakukan uji Hausman. (b) Uji Hausman, untuk memilih model terbaik antara model *fixed effect* atau *random effect*. Uji Hausman menggunakan nilai *Chi-Square* dengan asumsi eror individual tidak saling berkorelasi begitu juga eror kombinasinya. Penentuan model hasil uji Hausman dengan melihat tingkat signifikansi (α) $< 5\%$, maka H_0 tidak terdukung. Artinya, model terpilih, yaitu model *fixed effect*, demikian sebaliknya. Jika yang terpilih, yaitu model *fixed effect*, maka tidak perlu lagi melakukan uji *Lagrange Multiplier*. (c) Uji *Lagrange Multiplier*, untuk memilih model terbaik antara *common effect* atau *random effect*. Jika nilai $Chi-Square_{\text{statistik}} > Chi-Square_{\text{tabel}}$, maka H_0 tidak terdukung. Artinya, model terpilih, yaitu model *random effect*, demikian sebaliknya.

Kedua, pengujian hasil regresi, terkait pemenuhan kriteria *Best Linear Unbiased Estimator (BLUE)* dengan tiga uji, yaitu (a) uji multikolinearitas, dengan menguji koefisien korelasi (r) antar variabel independen dengan ketentuan, jika korelasi koefisien cukup tinggi melebihi 0,8 maka multikolinearitas menjadi

masalah yang serius di dalam model. (b) Uji heteroskedastisitas untuk melihat nilai residual, yaitu faktor lain yang terlibat, tetapi tidak masuk dalam model. Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Jika $p_{value} > \alpha = 5\%$, maka model terbebas dari heteroskedastisitas, demikian sebaliknya. (c) Uji autokorelasi dilakukan menggunakan uji *Durbin-Watson*. Autokorelasi sebagai korelasi kelambanan suatu deretan tertentu dengan dirinya sendiri, tertinggal oleh sejumlah unit waktu, namun serial korelasi sebagai korelasi kelambanan antara dua seri atau rangkaian yang berbeda (Gujarati, 2012)

Ketiga, pengujian hipotesis menggunakan regresi data panel. Tujuannya, untuk melihat pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap pembangunan manusia. Pengujian koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan uji t. Jika tingkat signifikansi (α) < 5%, maka koefisien regresi signifikan, sehingga hipotesis riset ini didukung, demikian sebaliknya. Sedangkan pengujian koefisien regresi secara simultan dilakukan dengan uji F. Jika tingkat signifikansi (α) < 5%, maka koefisien regresi signifikan. Artinya, secara bersama-sama variabel independen berpengaruh pada variabel dependen, demikian sebaliknya (Gujarati, 2012). Dalam pengujian ini, data DAU, DAK, dan DBH tahun 2010 akan dilihat pengaruhnya pada IPM tahun 2010, dan seterusnya. Model regresi data panel, disajikan pada persamaan (1).

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(1)$$

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it-1} + \beta_2 DAK_{it-1} + \beta_3 DBH_{it-1} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots(2)$$

IPM adalah indeks pembangunan manusia, t adalah data *time series* tahun amatan, yaitu tahun 2010-2016, i adalah data *cross section* pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan, β_0 adalah konstanta, β_{1-3} adalah koefisien variabel independen, yaitu DAU adalah Dana Alokasi Umum, DAK adalah Dana Alokasi Khusus, DBH adalah Dana Bagi Hasil, ε adalah variabel pengganggu.

Keempat, pengujian sensitivitas untuk menilai kekokohan hasil pengujian sebelumnya, menggunakan regresi data panel dengan model distribusi kelambanan (*lag*). Model ini dipilih karena menurut Gujarati (2012) dan Widarjono (2018) dampak dari implementasi kebijakan moneter dan fiskal, biasanya tidak secara langsung tetapi memerlukan waktu atau terjadi kelambanan (*lag*). Koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan uji t, jika tingkat signifikansi (α) < 5%, maka koefisien regresi signifikan, demikian sebaliknya (Gujarati, 2012). Penggunaan model *lag* satu tahun, membuat data DAU, DAK, dan DBH tahun 2010 akan dilihat pengaruhnya pada IPM tahun 2011, dan seterusnya. Model regresi data panel menggunakan model lag satu tahun, disajikan pada persamaan (2).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif variabel yang diteliti disajikan pada Tabel 2. Secara garis besar, ada kecenderungan peningkatan alokasi dana perimbangan dari pusat ke daerah di Pulau Kalimantan dan pembangunan manusia yang ditunjukkan dengan peningkatan angka IPM dari tahun ke tahun. Tahun 2016, dari sisi nilai tertinggi

IPM, DAK, dan DBH dimiliki oleh Kalimantan Timur, sedangkan DAU tertinggi dimiliki oleh Kalimantan Barat. Selain itu, tahun 2016, Kalimantan Barat memiliki IPM, DAK, dan DBH terendah, sedangkan DAU terendah dimiliki oleh Kalimantan Timur. Rata-rata (*mean*) IPM dan DAU selalu meningkat tiap tahunnya. Rata-rata DAK mengalami penurunan signifikan di tahun 2014, sedangkan DBH tahun 2014 hingga tahun 2016.

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
DAU (juta Rp)							
Mean	157.336	172.756	205.506	221.616	235.475	242.423	257.529
Minimum	13.068	16.472	16.451	16.954	17.101	19.788	22.964
Maksimum	318.748	349.791	408.302	445.550	472.334	513.258	507.746
Std.deviasi	126.587	138.301	161.595	177.595	190.126	212.425	203.602
DAK (juta Rp)							
Mean	9.441	13.411	13.068	13.349	13.808	59.913	159.100
Minimum	5.446	8.570	9.651	2.457	310	17.869	41.090
Maksimum	14.542	22.819	21.540	26.544	25.383	128.906	290.299
Std.deviasi	4.157	6.450	5.668	9.990	10.326	49.981	112.447
DBH (juta Rp)							
Mean	409.817	495.159	564.832	494.931	406.467	376.693	309.747
Minimum	30.913	34.397	40.149	35.153	37.840	32.044	34.460
Maksimum							812.520
	1.402.68	1.666.86	1.870.28	1.609.40	1.251.69	1.110.52	
	6	7	1	9	5	7	
Std.deviasi	663.009	783.273	873.490	746.144	567.271	496.254	347.379
IPM							
Mean	66,11	66,66	67,34	68,02	68,53	69,17	69,66
Minimum	61,97	62,35	63,41	64,30	64,89	65,59	65,88
Maksimum	71,31	72,02	72,62	73,21	73,82	74,17	74,59
Std.deviasi	3,87	4,00	3,84	3,74	3,77	3,60	3,62

Sumber: Data BPS dan BPK-RI, diolah

Hasil Pengujian Model Analisis Data Panel

Pengujian model analisis data panel disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4. Hasil uji Chow menemukan *p-value* 0,000 lebih kecil dari $\alpha=5\%$, artinya model *fixed effect* lebih baik daripada model *common effect*. Sedangkan, hasil uji Hausman menemukan *p-value* 0,000 lebih kecil dari $\alpha=5\%$, artinya model *fixed effect* lebih baik daripada *random effect*. Uji *Lagrange Multiplier* tidak dilakukan dalam riset ini, karena hasil uji Chow dan uji Hausman menemukan bahwa model *fixed effect* adalah model terbaik untuk analisis data panel.

Tabel 3
Hasil Uji Chow

<i>Effects Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	26,963553	(3.21)	0,000
<i>Cross-section Chi-Sq</i>	44,222579	3	0,000

Keterangan: signifikan pada $\alpha=5\%$

Tabel 4
Hasil Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section random</i>	80.890658	3	0,000

Keterangan: signifikan pada $\alpha=5\%$

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Hasil pengujian multikolinearitas dan heteroskedastisitas disajikan pada Tabel 5. Pengujian multikolinearitas menemukan variabel DAU, DAK, dan DBH mempunyai nilai koefisien korelasi $<0,8$. Artinya, ketiga variabel independen riset ini, tidak menunjukkan terjadi multikolinearitas. Pengujian heteroskedastisitas menemukan bahwa model riset ini terbebas dari heteroskedastisitas. Ini ditunjukkan dengan variabel DAU, DAK, dan DBH memiliki $pvalue > 5\%$.

Tabel 5
Hasil pengujian Multikolinearitas dan Heteroskedastisitas

Variabel	Uji Multikolinearitas			Uji Heteroskedastisitas	
	DAU	DAK	DBH	Prob	Sig.
DAU	1	-0,092	-0,704	0,058	Tidak Signifikan
DAK	-0,092	1	0,002	0,696	Tidak Signifikan
DBH	-0,704	0,002	1	0,884	Tidak Signifikan

Keterangan: DAU = Dana Alokasi Umum, DAK = Dana Alokasi Khusus, DBH = Dana Bagi Hasil

Berdasarkan model *fixed effect* dari pengujian sebelumnya, dilakukan uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin-Watson* (D-W). Hasil pengujian menemukan nilai *D-W* statistik sebesar 0,730, *D-W* tabel sebesar $dL=1,180$, dan $du=1,650$ dengan $\alpha=5\%$, sehingga *D-W* statistik terletak antara $0 < d < dL$. Artinya, terjadi autokorelasi positif dalam model riset ini. Model *fixed effect* riset ini mengalami masalah autokorelasi. Namun, masalah autokorelasi tidak perlu dikhawatirkan pada riset dengan data panel karena penggunaan data panel merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah autokorelasi dalam uji asumsi klasik (Gujarati, 2012). Oleh sebab itu, estimasi variasi *Generalized Least Square* (GLS) dilakukan untuk mengatasi autokorelasi runtun waktu dan korelasi antar observasi lintas sektoral (Insukindro 2001).

Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel 6 menyajikan hasil pengujian hipotesis menggunakan model *fixed effect*, metode GLS. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat diinterpretasikan bahwa variabel DAU memiliki $t_{statistik}$ 17,64 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga H_1 terdukung. Artinya, DAU berpengaruh positif pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Nilai koefisien DAU bertanda positif sebesar 0,0000175 memiliki arti bahwa jika DAU naik satu rupiah per kapita, maka IPM di Kalimantan akan naik sebesar 0,0000175, begitu juga sebaliknya. Variabel DAK memiliki $t_{statistik}$ 3,74 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$, sehingga H_2 terdukung. Artinya, DAK berpengaruh positif pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Nilai koefisien DAK bertanda positif sebesar 0,00000926 memiliki arti bahwa jika DAK naik satu rupiah per kapita, maka IPM di Pulau Kalimantan akan

naik sebesar 0,00000926, begitu juga sebaliknya. Sedangkan, variabel DBH memiliki $t_{\text{statistik}}$ sebesar -0,10 dan nilai signifikansi sebesar $0,920 > 0,05$, sehingga H_3 tidak terdukung. Artinya, DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan.

Tabel 6
Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Menggunakan Model *Fixed Effect* Metode GLS

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \varepsilon_{it}$$

Variabel	B	t-statistik	Prob
Konstanta	63,85	174,66	0,000
Dana Alokasi Umum	1,75E-05	17,64	0,000
Dana Alokasi Khusus	9,26E-06	3,74	0,001
Dana Bagi Hasil	-7,72E-08	-0,10	0,920
R ²	0,965		
Prob. F	0,000		

Hasil pengujian secara simultan dengan uji F menemukan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Artinya, secara bersama-sama variabel DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Nilai koefisien determinasi, yaitu R^2 sebesar 0,965 memiliki arti bahwa DAU, DAK, dan DBH mampu menjelaskan pembangunan manusia di Pulau Kalimantan sebesar 96,5% dan sisanya, yaitu sebesar 3,5% ditentukan oleh faktor lain diluar riset ini, misalnya saja Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Pengujian Sensitivitas

Pengujian sensitivitas dilakukan dengan menggunakan model *lag* satu tahun pada model regresi data panel. Tujuannya adalah untuk melihat kekokohan hasil pengujian sebelumnya karena menurut Gujarati (2012) dan Widarjono (2018), kebijakan moneter dan fiskal biasanya tidak secara langsung berdampak pada aktivitas ekonomi, tetapi memerlukan waktu atau kelambanan (*lag*). Penggunaan model *lag* satu tahun membuat data DAU, DAK, dan DBH tahun 2010 akan dilihat pengaruhnya pada IPM tahun 2011, dan seterusnya. Data DAU, DAK, DBH yang digunakan dalam model ini adalah data tahun realisasi tahun 2010-2016, sedangkan data IPM digunakan adalah data IPM tahun 2011-2017. Sebelum melakukan regresi data panel model *lag*, dilakukan pengujian model analisis data panel dan uji asumsi klasik. Hasil pengujian konsisten menemukan bahwa model *fixed effect* adalah model terbaik data panel. Sedangkan hasil uji asumsi klasik ditemukan model lolos uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas, namun tidak lolos uji autokorelasi, sehingga estimasi tetap menggunakan variasi GLS, seperti yang disarankan oleh Insukindro (2001) untuk mengatasi masalah autokorelasi. Tabel 7 menyajikan hasil pengujian sensitivitas menggunakan model *fixed effect* metode GLS model *lag*.

Tabel 7
Hasil Pengujian Sensitivitas Menggunakan Model *Fixed Effect* Metode GLS Model *Lag*

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it-1} + \beta_2 DAK_{it-1} + \beta_3 DBH_{it-1} + \varepsilon_{it}$$

Variabel	B	t _{statistik}	Prob
Konstanta	64,47	188,50	0,000
Dana Alokasi Umum	1,72E-05	18,01	0,000
Dana Alokasi Khusus	9,09E-06	3,90	0,000
Dana Bagi Hasil	1,70E-08	0,02	0,981
R ²	0,972		
Prob. F	0,000		

Konsisten dengan pengujian sebelumnya, pengujian dengan menggunakan *lag* menyajikan hasil yang sama dengan hasil pengujian sebelumnya. Berdasarkan hasil uji statistik, dapat diinterpretasikan bahwa variabel DAU memiliki t_{statistik} 18,01 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, artinya DAU berpengaruh positif pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Variabel DAK memiliki t_{statistik} 3,90 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya, DAK berpengaruh positif pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Variabel DBH ditemukan memiliki t_{statistik} 0,02 dan nilai signifikansi sebesar 0,981 > 0,05. Artinya, DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Hasil pengujian secara simultan dengan uji F menemukan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya, secara bersama-sama variabel DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan.

Pembahasan

Riset ini menemukan bahwa hipotesis 1 didukung oleh bukti empiris, DAU memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Ada hubungan positif antara DAU dan pembangunan manusia. Artinya, semakin besar DAU, maka pembangunan manusia di Pulau Kalimantan juga semakin tinggi, demikian sebaliknya. Temuan ini konsisten dengan hasil riset Lestari *et al.*, (2016) dan Zaufi *et al.*, (2016). Pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan menggunakan DAU untuk kegiatan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Sifat DAU yang berupa *block grants* ditemukan mempermudah pemerintah daerah ketika akan menentukan prioritas program untuk mengejar ketertinggalan daerahnya dengan daerah lain di Indonesia. Ini karena pemerintah pusat tidak melakukan intervensi terhadap penggunaan DAU di daerah. Selain itu, perubahan fokus pembangunan nasional menjadi pembangunan manusia membuat dasar alokasi jumlah DAU yang dialokasikan ke daerah ditentukan oleh IPM (BPS, 2018). Konsekuensinya, daerah-daerah yang memiliki IPM yang rendah mendapatkan porsi alokasi DAU yang relatif lebih tinggi untuk mengejar kesenjangan yang terjadi dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi ini ditemukan mendorong pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan memprioritaskan penggunaan DAU untuk kegiatan pelayanan publik, dengan melakukan kegiatan belanja modal untuk bidang

pendidikan dan kesehatan. Ini dilakukan dengan tujuan agar kualitas pendidikan meningkat, standar hidup masyarakat meningkat, serta masyarakat dapat hidup dengan sehat dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

Riset ini menemukan bahwa hipotesis 2 didukung oleh bukti empiris. DAK memiliki pengaruh positif pada pembangunan manusia. Artinya, semakin besar DAK, maka pembangunan manusia di Pulau Kalimantan juga semakin tinggi, demikian sebaliknya. Hasil riset ini konsisten dengan hasil riset Widarwanto *et al.*, (2014), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014) bahwa DAK dapat meningkatkan IPM. Riset Sarkoro dan Zulfikar (2016), Hairiyah *et al.*, (2017), Pake *et al.*, (2018) menemukan bahwa daerah menggunakan DAK untuk kegiatan pelayanan publik dalam bentuk kegiatan belanja modal. Pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan menggunakan DAK untuk kegiatan belanja modal di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan pelayanan umum. Penggunaan DAK seperti ini ditemukan dapat mendorong peningkatan kualitas hidup dan kualitas pendidikan warganya (Prmono dan Soesilowati 2016; Pake *et al.*, 2018). Pemerintah provinsi di Pulau Kalimantan sudah menggunakan DAK sesuai dengan amanat UU No. 23/2014, yaitu untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur publik dengan umur ekonomis yang lama.

Namun demikian, riset ini menemukan bahwa hipotesis 3 tidak didukung oleh bukti empiris, DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Temuan ini konsisten dengan hasil riset Harahap (2011), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014), dan Lestari *et al.*, (2016). Ada dua argumen yang menyebabkan DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. *Pertama*, DBH di Pulau Kalimantan mengalami penurunan signifikan dari tahun 2014-2016. Penurunan jumlah DBH dari pajak disebabkan karena sejak tahun 2013, penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan, diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga DBH dari PBB provinsi hanya berasal dari Perhutanan, Perkebunan, dan Pertambangan. Sedangkan, DBH dari sumber daya alam (SDA) di Pulau Kalimantan mengalami penurunan jumlahnya karena ada pembatasan jumlah produksi batu bara oleh pemerintah pusat dan penurunan harga jual produk batu bara akibat krisis ekonomi global. DBH SDA yang diperoleh daerah penghasil masih tidak sebanding dengan kebutuhan fiskal yang diperlukan untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi, sehingga DBH tidak memiliki pengaruh pada IPM (Harefa 2018).

Kedua, penggunaan DBH khususnya untuk DBH yang berasal dari SDA dibatasi oleh regulasi tentang kelestarian lingkungan hidup (Lestari *et al.*, 2016; Harefa 2018). Misalnya saja DBH dari Cukai Hasil Tembakau diatur penggunaannya minimal 50 persen untuk membiayai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi di bidang cukai, serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pembatasan tujuan penggunaan DBH membuat pemerintah daerah tidak dapat mengalokasikan dana tersebut untuk kepentingan belanja modal dalam rangka pembangunan manusia, sehingga dana ini ditemukan tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan.

Pengujian sensitivitas dengan menggunakan model *lag*, juga menemukan hasil yang konsisten bahwa secara parsial hanya DAU dan DAK yang memiliki pengaruh

positif pada pembangunan manusia, sedangkan DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Selain itu, pengujian sensitivitas juga menemukan hasil yang konsisten saat menguji DAU, DAK, dan DBH secara simultan, ketiga variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh pada pembangunan manusia. Penerapan desentralisasi di Indonesia membuat daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai program pembangunan di daerah (Syurmita 2014; Maria *et al.*, 2019; Maria & Halim, 2020). Hairiyah *et al.* (2017), Harefa (2018) menemukan perilaku belanja pemerintah daerah dipengaruhi oleh sumber penerimaannya, baik itu penerimaan yang bersumber dari PAD maupun dari dana perimbangan. Ini berarti semakin tinggi penerimaan pemerintah, maka pemerintah dituntut untuk memperbesar pengeluaran pemerintah untuk kegiatan belanja daerah dan investasi dalam bentuk belanja modal. DAU dan DAK digunakan daerah untuk mendanai kegiatan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Abdullah dan Halim 2003). Penggunaan DAU dan DAK untuk pengadaan prasarana dasar manusia, yaitu bidang pendidikan dan kesehatan ditemukan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kualitas pendidikan masyarakat (Pramono dan Soesilowati 2016; Pake *et al.*, 2018). Oleh sebab itu, tata kelola kebijakan dan anggaran yang transparan dan akuntabel dibutuhkan agar dana perimbangan yang disalurkan oleh pusat ke daerah dapat mendorong terpenuhinya layanan publik dan ketersediaan infrastruktur yang memadai agar kualitas sumber daya manusia yang diukur menggunakan IPM dapat meningkat (Kurniawati, 2012).

E. SIMPULAN

Riset ini memberikan bukti empiris bahwa dana perimbangan, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Pulau Kalimantan memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Ini berarti semakin besar DAU dan DAK, maka pembangunan manusia di Pulau Kalimantan juga semakin tinggi, demikian sebaliknya. Sedangkan dana perimbangan, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) ditemukan tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Ini karena DBH Pulau Kalimantan mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2014-2016 dan penggunaan DBH dari Sumber Daya Alam dibatasi oleh regulasi tentang kelestarian lingkungan hidup. Pengujian sensitivitas dengan menggunakan model kelambanan (*lag*) satu tahun juga memberikan temuan yang konsisten bahwa hanya DAU dan DAK yang memiliki pengaruh pada pembangunan manusia, sedangkan DBH tidak. Temuan bahwa DAU memiliki pengaruh terhadap pembangunan manusia sejalan dengan temuan riset Lestari *et al.*, (2016) dan Zaufi *et al.*, (2016). Riset ini juga mengkonfirmasi temuan riset Widarwanto *et al.*, (2014), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014) bahwa DAK memiliki pengaruh terhadap pembangunan. Sedangkan, DBH tidak memiliki pengaruh pada pembangunan manusia sejalan dengan temuan riset Harahap (2011), Ardiansyah dan Widyaningsih (2014), dan Lestari *et al.*, (2016). Secara simultan, dana perimbangan, yaitu DAU, DAK, dan DBH memiliki pengaruh pada pembangunan manusia di Pulau Kalimantan. Riset ini menemukan bukti bahwa implementasi desentralisasi membuat pemerintah daerah cenderung mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai pembangunan manusia di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Halim, A. (2003). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali. *Simposium Nasional Akuntansi VI*, 1140–1159.
- Ardiansyah, & Widyaningsih, A. V. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII Lombok*.
- BPS. (2018). *Indeks Pembangunan Manusia 2010-2017*.
- Chang, C., & Geoffrey, T. K. (2002). Bureaucratic Behavior in the Local Public Sector: A Revealed Preference Approach. *Public Choice*, 113(1), 191–210.
- Craigwell, R., Bynoe, D., & Lowe, S. (2012). The effectiveness of government expenditure on education and health care in the Caribbean. *International Journal of Development Issues*, 11(1), 4–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/14468951211213831>
- Dao, Q. M. (2012). Government expenditure and growth in developing countries. *Progress in Development Studies*, 12(1), 77–82. <https://doi.org/10.1177/146499341101200105>
- Fauzia, M. (2019, April 15). Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia Antar-Daerah Tinggi. *Kompas*. <https://money.kompas.com/read/2019/04/15/183100126/kesenjangan-indeks-pembangunan-manusia-antar-daerah-tinggi>
- Gujarati, D. (2012). *Basic Econometrics* (5th ed.). Mc Graw Hill.
- Hairiyah, H., Malisan, L., & Fakhroni, Z. (2017). Pengaruh dana alokasi umum DAU dana alokasi khusus DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *Kinerja*, 14(2), 85–91. <https://doi.org/10.29264/jkin.v14i2.2483>
- Harahap, R. U. (2011). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara. *JRAB: Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis*, 11(1), 47–58. <https://doi.org/10.30596/JRAB.V11I1.403>
- Harefa, M. (2018). Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. *Junral Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 9(2), 147–160.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kuncoro, M. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan* (Edisi 5). UPP STIM YKPN.

- Kurniawati, T. (2012). Konflik dalam Penentuan Dana Bagi Hasil antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Ekonomi*, 16(1), 16–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jsp.10909>
- Lestari, P., Sarfiah, N. S., & Prasetyanto, K. P. (2016). Analisis Pengaruh DAU, DAK, dan DBH terhadap IPM di Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2012-2016. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(1), 100–113.
- Maria, E., & Halim, A. (2020). Implementasi Kebijakan Desentralisasi dan Korupsi Kepala Daerah di Indonesia. In Harnovinsah, A. Sopanah, & R. P. Sari (Eds.), *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik* (1st ed., pp. 21–37). Unitomo Press.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i1.2036>
- Pake, S. D. S., Kawung, M. . G., & Luntungan, Y. A. (2018). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah pada Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Halmaher Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(04), 13–22.
- Pramono, Y. A., & Soesilowati, E. (2016). Determinan Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 5(3), 269–277.
- Ritonga, I. T. (2014). Analysing Service-Level Solvency of Local Governments from Accounting Perspective: A Study of Local Governments in the Province of Yogyakarta Special Territory, Indonesia. *International Journal of Governmental Financial Management*, XIV(2), 19–33. https://doi.org/10.5176/2251-1997_af14.60
- Sarkoro, H., & Zulfikar. (2016). Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2010), 54–63.
- Siswandi, Piturningsih, E., & Irwan, M. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal. *Assets*, 5(2), 281–298.
- Sjahrir, B. ., Kis-Katos, K., & Schulze, G. . (2013). Political Budget Cycles in Indonesian at the District Level. *Economics Letters*, 120(2), 342–345. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007>
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi: Suatu Pengantar* (Edisi 3). Raja Grafindo Persada.
- Syurmita. (2014). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Prediksi Financial Distress. *Konfrensi Regional Akuntansi*, 1–28.

- Undang-Undang Nomor 17. 2007. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025*.
- Undang-Undang Nomor 23. 2014. *Pemerintah Daerah*. Indonesia.
- UNDP. (1990). *Human Development Report 1990*. Oxford University Press.
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika* (Edisi 5). BPFE.
- Widarwanto, A., Erlina, & Yahya, I. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) terhadap IPM dengan Belanja Pelayanan Dasar (BPD) sebagai Moderating Variabel. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 7(2), 107 – 123.
- Widodo, A., Waridin, & K. Maria, J. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 25–42.
- Williantara, F. G., & Budiasih, N. A. G. I. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2044–2070.
- Zaufi, Y. M., Taufik, T., & Agusti, R. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening di 12 Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 30–42.